

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pengungkapan

Pengungkapan secara sederhana diartikan sebagai pengeluaran informasi (Sudarmadji dan Sularto, 2007). Sedangkan menurut Amuwarni (2006) yang dikutip dari Widiawati (2012) memaparkan bahwa pengungkapan dapat dikaitkan dengan dua aspek, yakni data dan laporan keuangan. Apabila dikaitkan dengan data, pengungkapan mengandung arti bahwa data harus memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan. Sedangkan apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, pengungkapan mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Dengan demikian, informasi tersebut harus lengkap, jelas, dan dapat menggambarkan secara tepat kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha tersebut.

Evans (2003) menyatakan bahwa pengungkapan erat kaitannya dengan empat pertanyaan yaitu : (1) kapan informasi harus diungkapkan, (2) berapa banyak informasi yang harus diungkapkan, (3) mengapa pengungkapan perlu untuk dibuat, (4) untuk siapa informasi tersebut diungkapkan.

Secara umum, menurut konsep pengungkapan dibagi menjadi tiga (Evans, 2003), yaitu :

1. Pengungkapan Cukup (*Adequate Disclosure*)

Pengungkapan cukup adalah pengungkapan minimum yang harus dipenuhi agar laporan keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Pengungkapan Wajar (*Fair Disclosure*)
Pengungkapan wajar adalah pengungkapan yang harus dicapai agar semua pihak mendapatkan informasi yang sama.
3. Pengungkapan Penuh (*Full Disclosure*)
Pengungkapan ini menuntut atas penyajian dan pengungkapan secara penuh atas seluruh informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan. Ada dua macam tipe pengungkapan dalam laporan keuangan (*financial report*) dan laporan tahunan (*annual report*).
 1. Pengungkapan Wajib (*mandatory disclosure*)
adalah pengungkapan bagian-bagian dalam laporan keuangan yang diwajibkan oleh Bapepom dan LK melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-38/PM/1996 kemudian direvisi dalam Peraturan Bapepom No. KEP-134/BL/2006 tanggal 7 Desember 2006 dan Ikatan Akuntansi Indonesia.
 2. Pengungkapan Sukarela (*voluntary disclosure*)
Adalah pengungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan sebagaimana tambahan pengungkapan minimum yang telah ditetapkan. Pengungkapan sukarela yang termasuk dalam kategori ini adalah pengungkapan tambahan terkait informasi keuangan perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan; kedua pengungkapan sukarela perusahaan ini seringkali diungkapkan dalam bentuk laporan tahunan (*annual report*) walaupun sekarang ini cukup banyak perusahaan yang menerbitkan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang terpisah dari laporan tahunan (*annual report*) dalam bentuk laporan keberlanjutan (*sustainability report*)
Menurut pandangan ekonomi islam, akuntabilitas diperlukan agar menghasilkan pengungkapan yang benar, adil, serta transparan. Menurut Abu-

Tapaneh (2009) akuntabilitas yang utama adalah kepada Allah SWT. Akuntabilitas dalam Islam percaya bahwa semua sumber daya yang tersedia untuk individu ada dalam bentuk kepercayaan. Oleh karena itu, pengungkapan fakta keuangan wajib untuk memberi informasi yang benar, akurat, dan tersedia bebas untuk pengguna laporan keuangan. Pengungkapan juga harus mampu memberikan informasi yang memadai yang dibutuhkan para *stakeholder* dan pengambilan keputusan.

2.1.2 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan tentang hubungan antara agen dan prinsipal. Agen yang dimaksud dalam hal ini adalah manajemen suatu perusahaan, sedangkan untuk prinsipal adalah pemilik perusahaan. Hubungan keagenan ini terjadi ketika salah satu pihak (prinsipal) menyewa pihak lain (agen) untuk melaksanakan suatu jasa. Pemegang saham merupakan prinsipal dan CEO adalah agen mereka.

Menurut Falichin (dalam Nanda, 2015), teori keagenan didasarkan atas berbagai aspek dan implikasi hubungan keagenan. Hubungan keagenan adalah hubungan antara *principal* atau pemilik dana dan *agent* yaitu pihak yang bertanggungjawab mengelola dana yang dirumuskan dalam sebuah kontrak. Adanya pemisahan fungsi antara pemilik dan pengelola tersebut memicu timbulnya *agency problem*. Adapun penyebab timbulnya *agency problem* adalah sebagai berikut :

1. Adanya perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Manajer yang diangkat oleh pemegang saham harus

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertindak untuk kepentingan pemegang saham. Demi terciptanya keberlanjutan usaha (*sustainability development*), prinsipal mengharapkan supaya agen dapat bertanggungjawab atas dampak dari aktifitas yang telah dilakukan oleh perusahaan. Oleh sebab itu, prinsipal mengharapkan adanya kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai salah satu bukti tanggungjawab tersebut. Bagi perusahaan, *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan rugi karena *cost* yang dikeluarkan sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR) sangat susah diasosiasikan dengan pendapatan, sedangkan bagi prinsipal *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap sebuah investasi demi terciptanya keberlangsungan usaha perusahaan di masa yang akan datang.

2. Pembagian resiko yang timbul pada saat prinsipal dan agen memiliki sikap yang berbeda terhadap resiko. Hal ini berkaitan dengan keputusan pendanaan. Para pemegang saham hanya peduli terhadap resiko sistematis dari perusahaan, karena mereka melakukan investasi pada portofolio yang terdiversifikasi dengan baik. Namun sebaliknya, manajer lebih peduli pada resiko perusahaan secara keseluruhan. Manajer merupakan orang yang *self interest* (mementingkan dirinya sendiri), *bounded rationality* (memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa yang akan datang), dan *risk adverse* (menghindari resiko). Oleh karena itu, manajer tidak mau menanggung resiko akibat biaya yang besar untuk kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) tanpa keuntungan yang pasti. Agen dapat memanfaatkan fleksibilitas pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk menjadikan kinerja yang buruk seolah-olah menjadi baik sehingga meraih empati dari *principal* karena *agent* telah bertindak sesuai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kontrak yang telah disepakati. Adanya *agency problem* maka prinsipal perlu menciptakan suatu system yang dapat memonitor dan mengontrol perilaku agen. Pengendalian yang dapat dilakukan adalah :

- a. Pemantauan. Prinsipal dapat merancang sistem pengendalian yang memantau tindakan agen, menghalangi tindakan yang meningkatkan kekayaan agen dengan mengorbankan kepentingan prinsipal.
- b. Kontrak insentif. Prinsipal mungkin mencoba untuk membatasi perbedaan referensi dengan kontrak insentif yang sesuai. Semakin besar penghargaan agen bergantung pada ukuran kinerja, semakin banyak insentif yang ada bagi agen untuk memperbaiki ukuran.
- c. Kompensasi Direksi dan manajemen serta rencana kepemilikan saham. Suatu perusahaan yang membayarkan bonus kepada direksi dan manajemennya dalam bentuk opsi saham merupakan suatu biaya agensi yang ada dalam ukuran kompensasi insentif.
- d. Manajer unit bisnis dan insentif berdasarkan akuntansi. Hubungan antara manajemen unit bisnis dan harga saham lebih jauh dibandingkan dengan hubungan antara manajerial dan harga saham. Sulit untuk mengisolasi kontribusi yang diberikan oleh unit bisnis individual terhadap peningkatan dalam harga saham perusahaan.

2.1.3 Teori Pengawasan

Fayol (dalam Harahap, 2001) mengemukakan bahwa pengawasan adalah upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Pengawasan dimaksudkan untuk mengantisipasi kelemahan dan kesalahan yang mungkin terjadi dimasa mendatang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lebih luas lagi pengertian pengawasan dikemukakan Situmorang dan Juhir (2003) yang mengemukakan : Dikalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian controlling ini dengan pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kata “kendali”, sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki kegiatan yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar. Kenyataan dalam praktek sehari-hari bahwa istilah controlling itu sama dengan istilah pengawasan dan istilah pengawasan inipun telah mengandung pengertian luas, yakni tidak hanya sifat melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi tadi tetapi juga mengandung pengendalian dalam arti menggerakkan, memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.

Berdasarkan deskripsi pengertian di atas, diperoleh suatu konsep pemahaman bahwa pengawasan (*controlling*) dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan serta mengoreksi penyimpangan yang terjadi dari aktivitas-aktivitas yang telah direncanakan. Dengan demikian, fungsi pengawasan adalah untuk mencegah sekecil dan sedini mungkin terjadinya suatu penyimpangan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas agar suatu pekerjaan tidak bertentangan dari prosedur dan ketentuan yang berlaku.

2.1.4 CSR Secara Konvensional

CSR memiliki arti yang berbeda, tergantung pada faktor lokal, seperti budaya, agama, hukum, dan kondisi pemerintahan. Definisi formal mengenai CSR yang berasal dari WBCSD (*World Business Council for Sustainable Development*) mengemukakan bahwa CSR merupakan suatu komitmen dari perusahaan untuk melaksanakan etika keprilakuan (*behavioral ethnics*) dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable economic development*).

Menurut Daniri (dalam Vena Agustian, 2015), CSR dapat didefinisikan sebagai tanggungjawab moral suatu perusahaan terhadap para stake holdersnya, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya.

Global Compact Initiative (GCI) menyebutkan bahwa konsep CSR mengandung pendekatan 3 P, yaitu : *Profit* , *People*, dan *Planet*. Elkington (Effendi, 2009) menyatakan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan haruslah memperhatikan 3P (*profit, people, dan planet*). Gagasan tersebut menyatakan bahwa perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, namun juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya (Wibowo dalam Vena Agustian, 2015).

CSR merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan karena konsep CSR tepat ditempatkan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Menurut Steur *et al* (dalam Vena Agustian, 2015), pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa melakukan pengorbanan kemampuan dari generasi masa depan dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasinya disebut sebagai pembangunan berkelanjutan. Tiga dimensi utama dari pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, social, dan lingkungan. Integrasi diantara ketiga dimensi tersebut disebut sebagai *triple-bottom-line* (Dyllick dan Hockerts, dalam Vena Agustian, 2015).

Dalam menentukan indikator apa saja yang harus diungkapkan terkait dengan pelaporan CSR, standar baku yang menjadi pedoman bagi perusahaan di dunia diantaranya adalah *Organization for Economic Cooperation and Development guidelines for multinational enterprise* (diterbitkan oleh Organisasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

for Economic Cooperation and Development (OECD)), *Social Sccountability* 8000 (diterbitkan oleh *Social Accountability Internasional*), *Greenhouse gas Protocol* (diterbitkan oleh *World Business Council for Sustainable Develompment* (WBCSD) dan World Resources Institute), *Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Guidelines* (diterbitkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI)), serta Sistem manajemen lingkungan (ISO 14001, EMAS). Diantara banyaknya standar yang dikeluarkan oleh berbagai organisasi, standar yang paling banyak digunakan oleh perusahaan adalah *Sustainability Reporting Guidelines* yang diterbitkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) pada tahun 2000, 2002, 2006, serta 2011 (GRI 3.1) (Hardiyanti, dalam Vena Agustian,2015).

Menurut Suharto (2006), konsep CSR sebagai sebuah tanggung jawab sosial perusahaan kini semakin diterima dengan luas. Walaupun ada beberapa pihak yang menganggapnya masih kontroversial, dimana mereka beragumen bahwa perusahaan sebagai pencari laba telah membayar sejumlah uang berupa pajak kepada negara untuk disalurkan kepada publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Sementara, pihak yang berseberangan menyatakan bahwa perusahaan tidak dapat dipisahkan dari individu yang terlibat didalamnya, seperti pemilik dan karyawan. Oleh karena itu, sudah bukan saatnya perusahaan hanya memikirkan keuntungan finansial semata, tetapi juga harus memperdulikan hak dan kepentingan publik, khususnya yang berada di sekitar perusahaan berktivitas.

Hingga saat ini belum ada definisi tetap atas tanggung jawab sosial, masing-masing pihak memiliki definisi dan interpretasi yang beragam mengenai CSR. Keragaman ini sesungguhnya merupakan cerminan dari perbedaan latar belakang serta pola pikir para praktisi yang mendefinisikan CSR, walaupun secara garis besar dapat terlihat bahwa mereka telah memiliki benang merah yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis dan memenuhi seluruh aspek ekonomi, social dan lingkungan dengan baik demi pembangunan yang berkelanjutan (Wibisono, 2007).

Dari sisi filosofi konvensional, terdapat beberapa teori yang melatarbelakangi pelaksanaan CSR dalam perusahaan, yaitu:

a. Teori Kapitalisme

Menurut Friedman (dalam Soraya, 2010) apabila perusahaan melakukan aktivitas CSR di luar kepentingan para pemegang sahamnya, maka itu menyalahi tujuan perusahaan. Satu-satunya kewajiban perusahaan dan termasuk CSR didalamnya adalah memberikan kemakmuran kepada pemegang saham. Aktivitas donasi dibolehkan jika dirasa dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dan bukan sekedar filantropi.

b. Teori Kontrak Sosial

Kontrak sosial dibangun dan dikembangkan, salah satunya untuk menjelaskan hubungan antara perusahaan terhadap masyarakat (*society*). Di sini, perusahaan atau organisasi memiliki kewajiban pada masyarakat untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Interaksi perusahaan dengan masyarakat akan selalu berusaha untuk memenuhi dan mematuhi aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga kegiatan perusahaan dapat dipandang *legitimate* (Deegan, 2002).

Hal ini sejalan dengan konsep *legitimacy theory* bahwa legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat keseuaian antara keberadaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan yang tidak mengganggu atau sesuai (*congruence*) dengan eksistensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan (Deegan, Robin, dan Tobin, 2002)

c. Teori Instrumen

Menurut teori ini CSR dipandang sebagai alat strategi untuk mencapai tujuan perusahaan. Sehingga menurut teori ini perusahaan dalam melakukan aktivitas CSR memiliki tujuan tertentu seperti menciptakan reputasi positif, kehumasan atau manfaat sejenis lainnya (Burke dan Logsdon, dalam Soraya, 2010).

d. Teori Legitimasi

Legitimasi merupakan hal yang penting bagi organisasi untuk menyadari bahwa ada batasan-batasan tertentu berupa norma-norma dan nilai-nilai sosial serta reaksinya sehingga mendorong perusahaan agar lebih memperhatikan nilai-nilai sosial di lingkungan perusahaan. Teori legitimasi mewajibkan perusahaan melakukan aktivitas tanggung jawab sosial karena mendapat tekanan dari lingkungan sekitar.

Ahmad dan Sulaiman (2004) mengatakan bahwa teori legitimasi didasarkan pada pengertian kontrak sosial yang diimplikasikan antara institusi sosial dan masyarakat.

Menurut Hadi (2011), legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah individu, dan kelompok masyarakat. Dalam teori legitimasi, perusahaan secara terus menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat dimana mereka berada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Teori Stack Holder

Widiawati (2012), mengatakan bahwa teori *stakeholders* merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun juga harus memberi manfaat bagi para *stakeholdernya* (Pemegang saham, kreditur, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain).

Gray et al dalam Chariri (2008) menyatakan : kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada stakeholder, dan dukungan tersebut harus dicari, sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Semakin powerfull stakeholder, semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai media komunikasi antara perusahaan dengan stakeholdernya.

Menurut Freeman dan McVea (2001) dalam Anggara (2010) definisi *stakeholders* adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Clarkson dalam Anggara (2010) membagi *stakeholder* menjadi dua berdasarkan karakteristiknya yaitu *stakeholder* primer dan *stakeholder* sekunder. Stakeholder primer adalah seseorang atau kelompok yang tanpanya perusahaan tidak dapat bertahan untuk *going concern*, meliputi : *shareholder* dan investor, karyawan, konsumen dan pemasok, bersama dengan yang didefinisikan sebagai kelompok *stakeholder* publik, yaitu : pemerintah dan komunitas. Kelompok *stakeholder* sekunder didefinisikan sebagai mereka yang mempengaruhi, atau dipengaruhi perusahaan, namun mereka tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan dengan transaksi dengan perusahaan dan tidak esensial kelangsungannya.

Definisi lain dilontarkan oleh Rhenald Kasali sebagaimana dikutip oleh Wibisono, 2007 (dalam Kirana, 2009) yang menyatakan bahwa yang dimaksud para pihak adalah setiap kelompok yang berada di dalam maupun diluar perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Dalam hal ini Rhenald Kasali membagi stakeholders menjadi sebagai berikut :

a. Stakeholders internal dan stakeholders eksternal

Stakeholders internal adalah stakeholders yang berada di dalam lingkungan organisasi. Misalnya karyawan, manajer, dan pemegang saham (shareholder), sedangkan stakeholders eksternal adalah stakeholders yang berada di luar lingkungan organisasi seperti penyalur atau pemasok, konsumen atau pelanggan, masyarakat, pemerintah, pers, dan sebagainya.

b. Stakeholders primer, stakeholders sekunder dan stakeholders marjinal

Dalam hal ini stakeholders yang paling penting disebut stakeholders primer dan stakeholders yang kurang mampu disebut stakeholders sekunder, sedangkan yang biasa diabaikan disebut stakeholders marjinal. Urutan prioritas ini bagi setiap perusahaan berbeda-beda, meskipun produk atau jasanya sama dan bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu.

c. Stakeholders tradisional dan stakeholders masa depan

Karyawan dan konsumen dapat disebut sebagai stakeholders tradisional. Karena saat ini sudah berhubungan dengan organisasi, sedangkan stakeholders masa depan adalah stakeholders pada masa 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun yang akan datang diperkirakan akan memberikan pengaruhnya pada organisasi seperti mahasiswa, peneliti, dan konsumen potensial.

- d. Proponents, opponents, dan uncommitted (pendukung, penentang, dan yang tidak peduli)

Di antara stakeholders ada kelompok yang memihak organisasi (*proponents*), menentang organisasi (*opponents*) dan yang tidak peduli atau abai (*uncommitted*). Organisasi perlu mengenal stakeholders yang berbeda-beda ini, agar dengan jernih dapat melihat permasalahan, menyusun rencana, strategi untuk melakukan tindakan yang proporsional.

- e. Silent majority dan vocal minority (pasif dan aktif)

Dilihat dari aktivitas stakeholders dalam melakukan komplain atau mendukung, tentu ada yang menyatakan penentangan atau dukungannya secara vocal (aktif) namun ada pula yang menyatakan secara silent (pasif).

Teori *stakeholder* merupakan teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja (*stakeholder*) perusahaan bertanggung jawab (Freeman, 2001, dalam Anggara, 2010).

2.1.5 Global Reporting Initiative (GRI) Index

Global Reporting Initiative (GRI) didirikan pada tahun 1997 oleh sejumlah perusahaan dan organisasi yang tergabung dalam Koalisi untuk Ekonomi yang Bertanggung-jawab terhadap Lingkungan (*Coalition for Environmentally Responsible Economies/CERES*), dengan misi mengembangkan panduan yang berlaku secara global untuk melaporkan ekonomi, lingkungan dan kinerja social (*Triple Bottom Line*), awalnya hanya untuk perusahaan dan pada



akhirnya untuk setiap bisnis atau pemerintah atau organisasi non-pemerintah (GRI dalam Hedberg dan Malmberg, 2003).

Lebih lanjut Hedberg dan Malmberg (2003) menyatakan bahwa Organisasi GRI terdiri dari perwakilan dari beberapa perusahaan di berbagai negara, LSM dan Organisasi PBB pada Program Lingkungan (*United Nation on Environmental Program/UNEP*). Untuk memastikan bahwa panduan dapat melayani sesuai tujuannya, maka dewan pemangku kepentingan (*stakeholders council*) secara berkesinambungan mengevaluasi pola panduan laporan dan konten laporan. Siapa saja dapat menjadi pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara bebas dan dapat memberikan komentar. *Stakeholders* didorong untuk mengembangkan panduan dan GRI berupaya untuk mendorong perusahaan yang menggunakan panduan untuk berkomunikasi dengan *stakeholder*.

GRI adalah organisasi nirlaba (*non-profit organization*), organisasi berbasis jaringan, dalam menjalankan aktivitasnya melibatkan banyak profesional dan organisasi dari berbagai sektor, konstituen dan daerah. Misi GRI adalah untuk membuat standar praktek laporan keberlanjutan, untuk mengaktifkan semua perusahaan dan organisasi untuk melaporkan aktivitas ekonomi, lingkungan, kinerja sosial dan tata kelola, dan untuk menyiapkan panduan laporan berkelanjutan dan dibagikan secara gratis (GRI, 2013).

Kerangka Pelaporan GRI ditujukan sebagai sebuah kerangka yang dapat diterima umum dalam melaporkan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial dari organisasi. Kerangka ini didesain untuk digunakan oleh berbagai organisasi yang berbeda ukuran, sektor, dan lokasinya. Kerangka ini juga memperhatikan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertimbangan praktis yang dihadapi oleh berbagai macam organisasi dari perusahaan kecil sampai kepada perusahaan yang memiliki operasi ekstensif dan tersebar di berbagai lokasi. Kerangka Pelaporan GRI mengandung kandungan isi umum dan sektor secara spesifik yang telah disetujui oleh berbagai pemangku kepentingan di seluruh dunia dan dapat diaplikasikan secara umum dalam melaporkan kinerja keberlanjutan dari sebuah organisasi (GRI, 2006).

Lebih lanjut GRI (2006) menyatakan bahwa, Panduan Laporan Keberlanjutan (disingkat Panduan) berisikan Prinsip-prinsip dalam mendefinisikan isi laporan dan menjamin kualitas dari informasi yang dilaporkan. Panduan juga meliputi Standar Pengungkapan yang terdiri atas Indikator Kinerja dan item pengungkapan lainnya sebagaimana halnya panduan akan topik teknis spesifik dalam pelaporan.

Pedoman laporan *Global Reporting Initiative* (GRI) adalah landasan dari kerangka pelaporan keberlanjutan GRI. Pedoman GRI *report* ini diterbitkan pada tahun 2006. Namun setelah penerbitan pedoman ini, terjadi perbaikan yang disarankan oleh dewan-dewan direksi dan versi terbaru diterbitkan pada tahun 2011 yaitu GRI G3.1. Pedoman ini dibagi menjadi dua bagian:

Bagian 1 - Prinsip dan Pedoman Pelaporan

- a. Prinsip untuk menetapkan isi laporan adalah: Materialitas, Pemangku Kepentingan, Konteks dan Kelengkapan Keberlanjutan.
- b. Prinsip untuk menetapkan kualitas laporan: Keseimbangan, Perbandingan, Kecermatan, Ketepatan Waktu, Kejelasan dan Keterandalan.
- c. Prinsip untuk menetapkan batas laporan.

Bagian 2 –Standar Pengungkapan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Strategi dan Analisis
- b. Profil Organisasi
- c. Parameter Laporan
- d. Tata Kelola, Komitmen, dan Keterlibatan
- e. Pendekatan Manajemen dan Indikator Kinerja

Penelitian ini mengacu pada penggunaan Indeks GRI 3.1 dimana indeks ini mengelompokkan indikatornya menjadi tujuh tema pengungkapan, yaitu :

- a. Ekonomi
- b. Lingkungan
- c. Praktik tenaga kerja
- d. Hak asasi manusia
- e. Kemasyarakatan
- f. Kewajiban produk
- g. Indeks khusus sektor keuangan

2.1.6 CSR Dalam Perspektif Islam

Berdasarkan konteks Islam, tanggung jawab dari tiap individu yang terdapat dalam Al Quran dan Hadits juga berlaku untuk organisasi atau perusahaan. Tujuan utama dari bisnis Islam adalah untuk memenuhi perintah Allah dengan cara mengikuti pedoman dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7: *“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya”*. Artinya, setiap perbuatan atau aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun organisasi, baik itu sekecil apapun akan mendapat balasan dariNya, tidak ada yang terlewat olehNya sebab Allah maha mengetahui dan

memperhitungkan segala sesuatu. Pada surat Al-A'laa ayat 7, Allah berfirman: *“Kecuali kalau Allah menghendaki. Sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi”*. Menurut ajaran agama Islam, manusia bertanggung jawab terhadap Allah dalam melaksanakan aktivitasnya dan segenap aktivitas dijalankan untuk mencapai RidhoNya (Al Attas dalam Fitria, 2010).

Berdasarkan perspektif Islam, tujuan utama dari pelaporan perusahaan adalah untuk menunjukkan kepatuhan terhadap syariah (Baydoun & Wilett dalam Hassan, 2010). Tujuan lain dari pelaporan adalah sebagai bahan untuk pengambilan keputusan ekonomi, namun dalam perspektif Islam, hal tersebut bukan tujuan utama. Terinspirasi dari filosofi “tanggung jawab manusia di hadapan Tuhan” dan “peran manusia sebagai khalifah di muka bumi” yang menjadi pedoman bagi ekonomi dan praktik keuangan Islam, investor individu dan institusi cenderung menaruh perhatian tidak hanya pada aktivitas ‘apa’ uang mereka digunakan, namun juga terhadap ‘cara’ proyek dan aktivitas tersebut dibiayai. Mereka menginginkan penggunaan dana yang halal.

Ada dua hal yang harus diungkapkan dalam perspektif Islam, yaitu pengungkapan penuh (*full disclosure*) dan akuntabilitas sosial (*social accountability*). Konsep akuntabilitas sosial terkait dengan pengungkapan penuh bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik akan informasi. Dalam konteks Islam, masyarakat mempunyai hak mengetahui informasi mengenai aktivitas organisasi untuk melihat apakah perusahaan tetap melakukan kegiatannya sesuai syariah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Terdapat beberapa prinsip yang sebetulnya menggambarkan adanya hubungan antara manusia dan Penciptanya, yaitu Allah SWT. Prinsip-prinsip ini adalah berbagi dengan adil, *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi seluruh alam), dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah (kepentingan masyarakat). Prinsip-prinsip ini sebenarnya mempunyai keterkaitan yang kuat dengan tujuan ekonomi syariah yang mengedepankan kepentingan masyarakat banyak. (Meutia dalam Erdhina, 2014)

1. Prinsip Berbagi dengan Adil

Berbagi memiliki makna memberikan apa yang dimiliki seseorang kepada orang lain. Selain itu, menurut (Meutia dalam Erdhina 2014), berbagi juga dimaknai sebagai berbagi hal yang non-materiil, seperti berbagi kebaikan serta menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar* (saling menasehati atau mengajurkan berbuat kebaikan dan mencegah kejahatan). Dalam praktik perbankan syariah, hal ini bisa dimaknai sebagai aktivitas untuk ikut mendukung program-program kebaikan bagi manusia dan lingkungan ataupun ikut serta mencegah timbulnya kerusakan di muka bumi. Meski demikian, jika kata berbagi dikaitkan dengan prinsip keadilan islam maka hal tersebut sangat kentara dalam praktik *mudharabah* (berbagi keuntungan dan kerugian), dimana pemilik modal dan pengguna modal (pekerja) ditempatkan pada posisi yang sejajar.

2. Prinsip *Rahmatan Lil'alamin* (Rahmat bagi Seluruh Alam)

Prinsip *rahmatan lil'alamin* berarti bahwa keberadaan manusia seharusnya bisa menjadi manfaat bagi makhluk Allah lainnya. Jika dikaitkan dengan kerangka bank syariah, maka manfaat keberadaan bank syariah seharusnya dapat dirasakan oleh semua pihak baik yang terlibat maupun tidak terlibat langsung dalam aktivitas perbankan syariah. Menurut (Meutia dalam Erdhina, 2014), bentuk rahmat atau keberpihakan ini dapat berupa pemberian zakat, infak, dan sedekah maupun pemberian pembiayaan kepada para pengusaha kecil. Meningkatkan kesejahteraan *stakeholders* merupakan bagian dari upaya menjadi *rahmatan lil'alamin* dan menjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan ekonomi syariah. Kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan material dan spiritual. (Meutia dalam Erdhina, 2014)

3. Prinsip *Maslahah* (Kepentingan Masyarakat)

Al-Shatibi dalam Samsiyah mengkategorikan *maslahah* ke dalam tiga kelompok yaitu : *essentials* (*daruriyyat*), *complementary* (*hajiyyat*), dan *embellishment* (*tahsiniyyat*). Level yang pertama yaitu *daruriyyat* didefinisikan sebagai pemenuhan kepentingan-kepentingan pokok dalam hidup yang berkaitan dengan pencapaian tujuan syariah yaitu melindungi *faith* (iman), *life* (kehidupan), *intellect* (akal), *posterity* (keturunan), dan *wealth* (harta). Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dan melindungi kepentingan yang berkaitan dengan *daruriyyat* merupakan prioritas yang harus dilakukan. Level kedua adalah *hajiyyat* dijelaskan oleh Al-Shatiby merujuk pada kepentingan tambahan yang apabila diabaikan akan menimbulkan kesulitan tetapi tidak sampai ke level merusak kehidupan normal. Level ketiga dari piramida *maslahah* adalah prinsip *tahsiniyyat*. Kepentingan yang harus dipertimbangkan pada level ini adalah kepentingan yang berfungsi sebagai penyempurna kepentingan pada level sebelumnya. Pada level ini bank syariah diharapkan menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sosial dengan melakukan hal yang dapat membantu menyempurnakan kondisi kehidupan *stakeholder*. Penggunaan prinsip *maslahah* sangat penting dalam praktik pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah. Hal ini karena dapat memberikan panduan yang jelas mengenai kepentingan apa dan siapa yang harus didahulukan supaya tidak timbul ketidakadilan. (Meutia dalam Erdhina, 2014)

2.1.7 *Islamic Social Reporting (ISR) Index*

Islamic Social Reporting Index merupakan sebuah standar alternatif yang digunakan untuk mengukur pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan yang berbasis syariah. *Islamic Social Reporting Index* merupakan standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), hanya saja standar yang dikeluarkan AAOIFI tidak menyebutkan keseluruhan item terkait CSR yang harus diungkapkan perusahaan sehingga tidak dapat menghasilkan pelaporan yang baik dan menyeluruh.

Hanifah (2002) menyusun suatu kerangka syariah. Berdasarkan kerangka syariah dapat dilihat bahwa tauhid merupakan landasan dasar dari ajaran Islam sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada kerangka tersebut juga menunjukkan konsep etika dalam Islam yang terdiri dari sepuluh konsep antara lain iman (*faith*), *taqwa* (*piety*), amanah (*trust*), ibadah (*workship*), *khilafah* (*vicegerent*), *ummah* (*community*), *akhirah day of reckoning*, *adl* (*justice*) dan *zulm* (*tyranny*), halal (*allowable*) dan haram (*forbidden*), serta *I'tidal* (*moderation*) dan *israf* (*extravagance*).

Berdasarkan konsep etika dalam Islam tersebut terbentuklah akuntabilitas dalam perspektif ekonomi Islam yaitu pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam ekonomi konvensional, pelaporan tanggung jawab sosial dikenal sebagai perpanjangan dari system pelaporan keuangan yang merefleksikan ekspektasi sosial yang lebih luas sehubungan dengan peran masyarakat dalam ekonomi atau kegiatan bisnis perusahaan.

Haniffa (2002) berpendapat bahwa pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan pada sistem konvensional hanya berfokus pada aspek material dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

moral. Ia menambahkan bahwa seharusnya aspek spiritual juga dijadikan sebagai fokus utama dalam pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan karena para pembuat keputusan Muslim memiliki ekspektasi agar perusahaan mengungkapkan informasi-informasi terbaru secara sukarela guna membantu dalam pemenuhan kebutuhan spiritual mereka. Oleh karena itu, ia memandang bahwa perlu adanya kerangka khusus untuk pelaporan pertanggungjawaban social yang sesuai dengan prinsip Islam. Kerangka tersebut tidak hanya berguna bagi para pembuat keputusan Muslim, tetapi juga berguna bagi perusahaan syariah, dalam hal ini adalah perbankan syariah dalam memenuhi pertanggungjawabannya terhadap Allah dan masyarakat. Kerangka pertanggungjawaban tersebut oleh Haniffa (2002) disebut dengan *index Islamic Social Reporting* atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan indeks Pelaporan Sosial Keislaman (indeks PSKI).

Haniffa (2002) membuat lima tema pengungkapan indeks ISR, yaitu tema pendanaan dan investasi, tema produk dan jasa, tema tenaga kerja, tema sosial, serta tema lingkungan. Lima tema pengungkapan indeks ISR berdasarkan penelitian Haniffa kemudian dikembangkan oleh Othman, Thani, dan Ghani (2009) dengan menambahkan satu tema pengungkapan yaitu tema Tata Kelola Perusahaan.

Kebanyakan penelitian yang terkait dengan CSR syariah biasanya menggunakan model yang dikembangkan oleh masing-masing peneliti berdasarkan pada standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI (Haniffa, 2002; Othman et al, 2009). Indeks ISR yang sering digunakan adalah indeks yang dibuat oleh Othman et al (2009) yang merupakan sebuah pengembangan model ISR yang digagas oleh Haniffa (2002). Indeks ini membagi *item* pelaporan menjadi enam indikator, yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Investasi dan keuangan
- b. Produk dan jasa
- c. Tenaga kerja
- d. Masyarakatan
- e. Lingkungan
- f. Tata kelola perusahaan

2.1.8 Manfaat CSR Terhadap Bank Syariah

Pengungkapan CSR oleh bank syariah selain merupakan bentuk tanggung jawab moral tentunya juga dapat memberikan banyak manfaat kepada bank syariah itu sendiri. CSR yang proaktif secara positif mempengaruhi kinerja keuangan melalui penciptaan aset tak berwujud seperti reputasi yang baik, kepercayaan, dan komitmen yang akan membawa organisasi pada kesuksesan jangka panjang. Hal ini kemudian akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menarik sumber daya, meningkatkan kinerja, dan membangun *competitive advantage* sekaligus memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan (Fombrun *et al.*, 2000 dalam Hassan, 2010).

Hal senada juga dinyatakan oleh Little (2003), dimana pemenuhan akan satu tanggung jawab etis atau sosial, bersamaan dengan strategi mempertahankan profit akan membawa *tangible benefit* kepada bisnis. Beberapa *benefit* yang diperoleh diantaranya: peningkatan reputasi perusahaan; manajemen yang lebih baik dalam jangka panjang karena menghindari skandal lingkungan dan hal yang tidak bertanggung jawab; meningkatkan kepuasan karyawan; dorongan kepada perusahaan untuk belajar dan membuat inovasi ketika melihat peluang pasar baru; meningkatnya posisi di dalam pasar dan profitabilitas jangka panjang.

2.1.9 Perkembangan CSR pada Bank Syariah

Terlepas dari kemajuan dan pertumbuhan yang terjadi pada industri perbankan syariah, beberapa kritik muncul terhadap praktik dari keuangan Islam, masih ada kesangsian pada kemurnian dari produk yang ditawarkan, begitupun dengan kesungguhan dari pihak-pihak yang mengelola bank tersebut. Beberapa diantaranya bahkan mempertanyakan kredibilitas dan etika dari para praktisi keuangan di bank syariah (Parker, 2004 dalam Sairally, 2005).

Farook dan Lanis (2006) menjelaskan bahwa penelitian-penelitian yang sementara ini dilakukan mengindikasikan bahwa perbankan-perbankan syariah belum secara baik dalam mengimplementasikan fungsi sosialnya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, praktik dan pengungkapan CSR yang baik oleh bank syariah merupakan salah satu wujud pembuktian pada masyarakat bahwa bank syariah telah memenuhi prinsip Islam dalam menjalankan aktivitasnya.

Isu yang terkait dengan pengungkapan CSR oleh institusi Islam adalah belum adanya standar baku dalam hal pengungkapan CSR tersebut. Berdasarkan analisis di beberapa perbankan syariah di dunia, Farook dan Lanis (2006) menemukan adanya perilaku kebebasan dalam menyajikan informasi sosial dalam laporan tahunan karena para regulator tidak mengatur dan mewajibkan secara tegas agar masing-masing perbankan syariah menyediakan informasi tanggung jawab sosial perbankan syariah tersebut.

Fitria (2010) menyatakan bahwa ketiadaan standar CSR secara syariah menjadikan pelaporan CSR institusi atau perusahaan syariah menjadi tidak seragam dan standar. Karim (dalam Soraya, 2010) berpendapat bahwa AAOIFI tidak memiliki kekuatan untuk mewajibkan lembaga keuangan syariah mengikuti standar yang diusulkannya. Namun demikian, AAOIFI memiliki strategi untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat lembaga syariah mengikuti standarnya melalui kerja sama dengan bank sentral sebagai regulator perbankan dan institusi pemerintah karena lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk mengatur dan menentukan kebijakan akuntansi.

2.1.10 Deskripsi Model *Benchmark* Pengungkapan CSR Bank Syariah

Harahap (2003) menyatakan bahwa belum adanya standar akuntansi yang disepakati bersama dalam penyusunan laporan tahunan menyebabkan lembaga-lembaga keuangan syariah masih menggunakan standar-standar yang digunakan dalam laporan entitas konvensional. Meskipun AAOIFI telah menyusun standar-standar akuntansi (termasuk aspek-aspek pengungkapannya), banyak pihak menyatakan bahwa konsepnya masih menggunakan paradigma konvensional. Selain itu, standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI belum dapat dijadikan sebagai suatu standar pengungkapan CSR karena tidak menyebutkan secara rinci keseluruhan variabel terkait CSR yang harus diungkapkan oleh perusahaan (Fitria, 2010). Oleh karena itu, beberapa peneliti berusaha untuk merumuskan nilai-nilai Islam di dalam standar akuntansi AAOIFI, diantaranya adalah Harahap (2003).

Haniffa (2002) menyatakan bahwa praktik pengungkapan informasi sosial menurut perspektif Islam seharusnya berbeda dengan perspektif konvensional karena jenis informasi yang perlu disajikan juga berbeda. Penggunaan kerangka syariah diperlukan dalam penyusunan konsep *Islamic Social Reports* yang memenuhi tujuan akuntabilitas dan transparansi sebagai bentuk hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

Berdasarkan penelitian Hassan dan Harahap (2010), terdapat delapan dimensi utama yang digunakan sebagai *benchmark* mengukur pengungkapan CSR bank syariah sebagai pengembangan indeks ISR yang dikeluarkan oleh AAOIFI :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. *Ethical Behavior, Stakeholder Engagement, Customer Relations* (EBSE & CR)

Dimensi yang pertama terkait dengan tanggung jawab bank syariah dalam hal perilaku yang sesuai etika, kesepakatan dengan para pemangku kepentingan, dan hubungan dengan nasabah. Bank syariah bertanggung jawab secara finansial dan moral terhadap bisnis yang dijalankan. Terkait dengan hal tersebut, bank syariah harus mengungkapkan bahwa mereka telah melakukan aktivitas yang sejalan dengan prinsip syariah untuk memenuhi kontrak dengan para pemangku kepentingan, termasuk nasabah yang menitipkan dananya di bank tersebut. Bank syariah diharapkan untuk mengungkapkan aspek-aspek terkait manajemen, diantaranya: pernyataan bahwa bank beroperasi sesuai dengan prinsip syariah; memiliki penghargaan yang tinggi terhadap para pemangku kepentingan dan nasabah; serta fokus pada distribusi bagi hasil atau keuntungan.

- b. *Corporate Governance - Board of Directors and Top Management* (CG-BD & TM)

Dimensi kedua menggambarkan tanggung jawab bank syariah dilihat dari sisi tata kelola perusahaan dan kepengurusan di dalam organisasi. Pihak-pihak yang memimpin dan memiliki otoritas di dalam bank syariah diharapkan memiliki kompetensi dan pengetahuan yang relevan dalam menjalankan bank syariah. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain: nama, posisi dewan direksi dan *top management*-profil dari anggota dewan direksi dan *top management* sebagai indikator akan pengetahuan dan kompetensi mereka mengenai bank syariah; kepemilikan saham jajaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

direksi; adanya komite audit dan Dewan Pengawas Syariah; serta praktik manajemen risiko.

c. *Shari'ah Supervisory Board (SSB)*

Dimensi ketiga terkait dengan fungsi penting dari Dewan Pengawas Syariah. Setiap bank syariah memerlukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berperan dalam memastikan bahwa rumusan dan metode yang digunakan telah sejalan dengan prinsip syariah dan norma Islam. Berdasarkan indeks ISR, variabel yang secara ideal harus diungkapkan oleh bank syariah terkait dengan DPS adalah: nama, latar belakang, dan keahlian bidang syariah dari anggota DPS; remunerasi yang diterima dan jumlah pertemuan atau rapat yang diadakan di dalam satu periode pelaporan; pengesahan terhadap distribusi bagi hasil yang memenuhi aturan syariah dan perhitungan zakat; serta pembuktian bahwa semua operasi, pendapatan, atau profit diperoleh secara halal oleh bank syariah.

d. *Product, Services and Fair Dealing with Supply Chain (PS & FDSC)*

Dimensi PS & FDSC mencakup pengungkapan tanggung jawab bank syariah atas produk dan jasa yang ditawarkan. Bank syariah harus mendanai dan mendukung proyek atau transaksi yang dibolehkan dalam Islam (halal) serta menghindari pembiayaan dan investasi pada aktivitas yang dilarang dan dibenci oleh Allah, yaitu segala sesuatu yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Informasi yang harus diungkapkan oleh bank syariah adalah sebagai berikut: pengenalan produk dan jasa yang ditawarkan, dan jika produk tersebut baru diperkenalkan, konsep dasar syariah yang mendukung produk baru tersebut; hanya melakukan akad (kontrak/ kesepakatan) yang diterima dalam Islam; alasan terjadinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transaksi tersebut; opini dari DPS terkait dengan kesesuaian produk dan jasa bank dengan prinsip syariah.

e. *Environment* (ENV)

Dimensi lingkungan merupakan bentuk pengungkapan tanggung jawab bank syariah terhadap pelestarian lingkungan hidup. Islam melarang umat manusia untuk melakukan kerusakan terhadap lingkungan karena hal tersebut akan merugikan baik individu, komunitas, dan makhluk lainnya. Berikut ini adalah beberapa hal yang sebaiknya diungkapkan oleh bank syariah terkait dengan tanggungjawab terhadap lingkungan hidup: peningkatan pelestarian lingkungan melalui program tertentu; meningkatkan dan mendorong proyek penghematan energi; jumlah yang didonasikan untuk proyek pelestarian lingkungan; serta apakah bank syariah telah membiayai proyek yang akan membawa kerusakan lingkungan.

f. *Employees* (EMP)

Dimensi keenam terkait dengan tanggung jawab bank syariah terhadap pegawai di dalam perusahaan. Sumber Daya Manusia atau pegawai perusahaan adalah aset terbesar dari suatu bisnis. Kesuksesan bank syariah salah satunya ditentukan oleh ketersediaan pegawai yang terlatih serta memiliki kecakapan dan pengetahuan mengenai bank syariah. Oleh karena itu, bank syariah perlu mengungkapkan hal-hal berikut: kebijakan terkait dengan kesejahteraan karyawan; pengadaan pelatihan untuk karyawan terkait dengan *professional skill*; pemberian kesempatan yang sama kepada setiap karyawan; serta *reward* atau penghargaan kepada karyawan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. *Strategic Social Development (SSD)*

Dimensi pengembangan sosial yang bersifat strategis merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang paling umum dikenal oleh masyarakat. Pertanggungjawaban dalam dimensi ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan dan aktivitas sosial di masyarakat. Islam menjunjung tinggi keadilan sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, bank syariah diharapkan untuk lebih bertanggung jawab secara sosial dibandingkan dengan bank konvensional. Melalui pengungkapan CSR, bank syariah harus melaporkan variabel-variabel seperti Zakat, Qardh Hasan, amal (*charity*) dan aktivitas sosial lainnya:

- Zakat

Informasi yang disajikan oleh Bank syariah, selain untuk menunjukkan kepatuhan terhadap syariah juga membantu umat muslim untuk melaksanakan kewajibannya, terutama dalam hal pembayaran zakat. Hal yang penting untuk diungkapkan terkait dengan pengelolaan zakat ialah: sumber dana zakat dan penggunaannya dan pengesahan dari DPS bahwa bank telah melakukan penghitungan zakat dengan benar, serta sumber dan penggunaan dana zakat tersebut telah sah berdasarkan hukum Islam.

- Qardh Hasan

Secara terminologi, *al-qardu al-hasan (benelovent loan)* ialah suatu pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dalam hal ini si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali pinjaman. Sifat dari Qardh adalah tidak memberikan keuntungan bagi si peminjam (Antonio, 2001). Hal yang penting untuk diungkapkan terkait dengan pengelolaan Qardh hasan ialah: jumlah dana Qardh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasan, sumber, dan penggunaan dana tersebut; kebijakan terkait dengan nasabah yang tidak mampu mengembalikan pinjaman.

- *Charity* dan aktivitas sosial

Charity bersifat sukarela, berbeda dengan zakat yang merupakan kewajiban dalam Islam. Berdasarkan etika bisnis Islam, orang yang kaya bukanlah pemilik sebenarnya kekayaan mereka; mereka hanyalah orang yang dipercaya (dititipkan oleh Allah). Mereka harus menggunakan kekayaan yang dimiliki sejalan dengan prinsip kepercayaan, salah satu yang paling penting adalah memenuhi kebutuhan masyarakat miskin (Naqvi, 2001). Selain itu, debitur mendapat perhatian khusus dalam Islam, di mana kreditur (bank) diminta untuk tidak terlalu keras terhadap debitur yang mengalami masalah dalam pembayaran utangnya. Hal yang penting untuk diungkapkan terkait dengan *Charity* dan aktivitas sosial ialah jumlah, sumber, dan penggunaan dana amal terpisah dari pelaporan zakat.

- *Strategic charity*

Hassan dan Latiff (2009) menyatakan bahwa *charity* yang murni umumnya meliputi bantuan terhadap pendidikan, seni, kebudayaan, kesehatan dan pelayanan sosial, serta proyek kemasyarakatan. Sedangkan *strategic charity* mengombinasikan kedermawanan dan sponsorship perusahaan dengan melakukan program yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan tujuan perusahaan. Di dalam kebijakan CSR, kebutuhan dari komunitas di mana bank syariah beroperasi harus dipenuhi terlebih dahulu. Oleh karena itu, hal yang penting untuk diungkapkan terkait dengan indikator ini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diantaranya: dukungan organisasi yang menguntungkan masyarakat dan partisipasi dalam aktivitas sosial, aktivitas terkait dengan kesejahteraan masyarakat yang disponsori oleh pemerintah; serta solidaritas sosial.

h. *Research, Development & Training (RD&T)*

Dimensi terakhir dalam indeks ISR yaitu penelitian, pengembangan, dan pelatihan. Pengungkapan ketiga elemen ini menggambarkan tanggung jawab bank syariah dalam hal usaha peningkatan kinerja yang lebih baik. Dalam kebijakan CSR terkait dengan penelitian, pengembangan, dan pelatihan, bank syariah diharapkan mengungkapkan laporan tahunannya: penyusunan kebijakan; dukungan strategi pembuatan keputusan; kurikulum pelatihan yang terstandarisasi; serta *database management*.

2.1.11 Indeks GRI dan Indeks ISR Dalam Pengungkapan CSR

Penggunaan Indeks GRI sebagai standar untuk pengukuran pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sudah banyak dilakukan oleh berbagai perusahaan. Hanya saja, penggunaan indeks ini dirasa masih belum cocok digunakan untuk semua industri, terutama untuk industri yang berhubungan dengan sektor syariah. Pada sektor yang berhubungan dengan syariah diperlukan suatu indeks khusus yang dapat membantu mengukur pengungkapan tanggung jawab sosial agar lebih baik dalam pelaporannya. Indeks lain yang dirasa cocok ini adalah indeks *Islamic Social Reporting (ISR)* yang dikemukakan oleh Haniffa (2002) dan kemudian dikembangkan oleh Othman *et al* (2010).

Tanggung jawab sosial dapat diukur dengan berbagai standar. Salah satu yang paling umum digunakan adalah pengukuran berdasarkan indeks GRI yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikeluarkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI), namun terdapat indeks lain yang dapat mengukur tanggung jawab sosial khususnya tanggung jawab sosial yang diungkapkan oleh industri yang berbasis syariah. Indeks ini dikenal dengan *Islamic Social Reporting* dikemukakan oleh Haniffa (2002) dan dikembangkan lebih lanjut oleh Othman *et al* (2010).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Soraya dan Hartanti (2010) dengan judul “*Islam dan Tanggung Jawab Sosial : Studi Perbandingan Pengungkapan berdasarkan Global Reporting Initiative Indeks dan Islamic Social Reporting Indeks*”. Penelitian ini focus pada perbandingan dalam praktek pengungkapan CSR antara perbankan Syariah dan perbankan konvensional di Indonesia. Sampel penelitian mengambil 3 bank syariah dan 3 bank konvensional. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bank konvensional secara umum memiliki skor lebih tinggi dibandingkan bank syariah dalam pengungkapan CSR, meskipun di beberapa hal bank syariah lebih baik, dan sebagai tambahan bahwa perbankan syariah masih dalam tahap perkembangan hingga saat ini di Indonesia. Penelitian ini memprediksi untuk masa mendatang indeks ISR akan lebih terbiasa digunakan, dan dimungkinkan antara indeks GRI dan indeks ISR bisa dikonvergensi.

Penelitian oleh Hafiez Sofyani (2015) dengan judul “*Perbankan Syariah dan Tanggung jawab Sosial : Sebuah Studi Komparasi Indonesia dan Malaysia Dengan Pendekatan Islamic Social Reporting Index dan Global Reporting Initiative Index*”. Penelitian ini bertujuan membandingkan kinerja sosial perbankan syariah yang ada di Indonesia dan Malaysia dengan menggunakan model *Islamic Social Reporting (ISR) Index* dan *Global Reporting Initiative (GRI) Index*. Objek penelitian ini diambil dari tiga

bank syariah di Indonesia dan tiga bank Islam di Malaysia yang memenuhi kriteria tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja social secara keseluruhan rata-rata perbankan syariah di Malaysia lebih tinggi dari Indonesia. Ketika diuji secara statistic, perbedaan ini tidak menunjukkan nilai yang signifikan. Selain itu, ada perbankan *non-islamic* di Indonesia dan Malaysia yang mencapai tingkat sempurna (100%) antara kinerja social dari ISR dan Indeks GRI.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini diawali dengan melakukan analisis perbandingan mengenai pengungkapan masing-masing tema CSR yang dilakukan oleh bank konvensional dan bank syariah. Setelah melakukan perbandingan pada masing-masing tema, maka dilakukanlah perbandingan secara menyeluruh terhadap keseluruhan tema yang diungkapkan oleh bank syariah dan bank konvensional.

Untuk lebih memudahkan penafsiran tentang makna istilah yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan makna beberapa definisi operasional penelitian sebagai berikut :

1. *Coorporate Social Responsibility (CSR)*

Yang dimaksud dengan CSR adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada stakeholdersnya atau masyarakat umum dimana perusahaan beroperasi dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

2. **Bank Konvensional**

Yang dimaksud bank konvensional adalah perusahaan perbankan beroperasi menggunakan instrument bunga (*interest*) yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengungkapkan tanggung jawab sosialnya (CSR) menggunakan *Global Reporting Initiative* (GRI) indeks. Adapun indeks pelaporannya terdiri dari empat tema yaitu : Ekonomi, sosial, lingkungan, profil dan strategi.

3. Bank Syariah

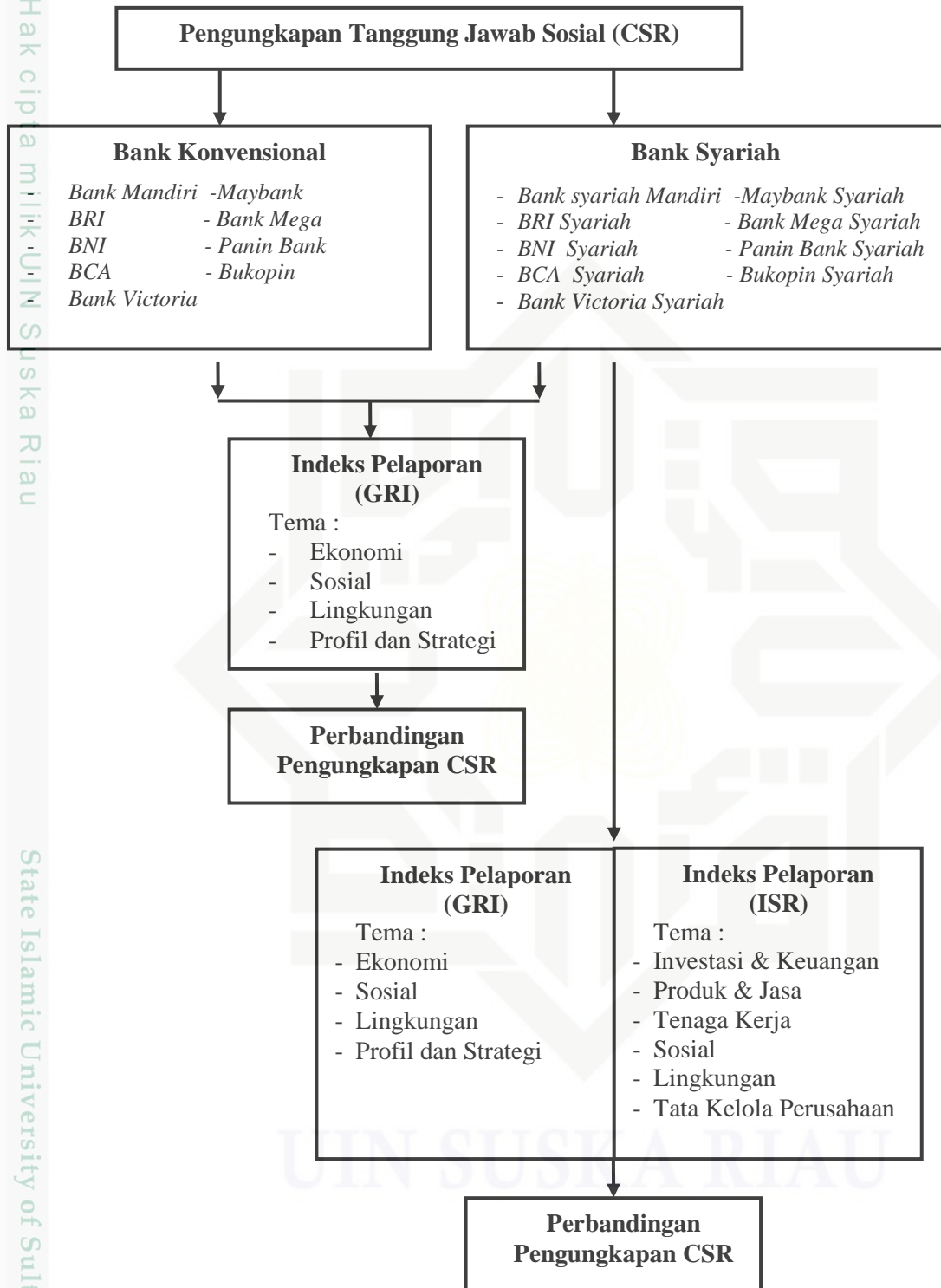
Yang dimaksud bank Syariah adalah perusahaan perbankan beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang mengungkapkan tanggungjawab sosialnya (CSR) menggunakan *Islamic Social Reporting* (ISR) indeks. Adapun indeks pelaporannya terdiri dari enam tema yaitu : investasi dan keuangan, produk dan jasa, tenaga kerja, sosial, lingkungan, dan tata kelola perusahaan.

4. Perbandingan

Yang dimaksud perbandingan dalam penelitian ini adalah perbedaan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) masing-masing perusahaan perbankan yang ditunjukkan dengan hasil skoring pada setiap tema pelaporan CSR dalam laporan tahunan (*annual report*) perusahaan perbankan.

Untuk memudahkan pemahaman penelitian, maka dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber : Data Olahan, 2016

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.